



Mukti Mulyana/SMERU

## SITUASI KETENAGAKERJAAN DI LAPANGAN USAHA YANG TERDAMPAK PANDEMI COVID-19

Muhammad Adi Rahman, Ahmad Zuhdi Dwi Kusuma, Hafiz Arfyanto

### RANGKUMAN EKSEKUTIF

Krisis ekonomi yang dipicu oleh pandemi COVID-19 memengaruhi situasi ketenagakerjaan di Indonesia. Sejumlah tenaga kerja terpaksa dirumahkan dan bahkan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat terganggunya kegiatan operasional perusahaan yang terdampak krisis ini. Ada enam lapangan usaha yang berpotensi terdampak cukup parah, yaitu penyedia akomodasi, dan makanan dan minuman; perdagangan; transportasi dan pergudangan; konstruksi; industri pengolahan; dan jasa lainnya. Berdasarkan data Sakernas dan Susenas 2019, enam lapangan usaha tersebut didominasi oleh tenaga kerja dari kelompok ekonomi menengah yang mayoritas merupakan lulusan sekolah menengah atas (SMA). Jika dilihat dari status pekerjaannya, sektor penyedia akomodasi, dan makanan dan minuman; perdagangan; serta transportasi dan pergudangan didominasi oleh pekerja informal. Selain itu, krisis ini juga berpotensi menekan tingkat partisipasi kerja perempuan, khususnya di sektor jasa lainnya dan penyedia akomodasi, dan makanan dan minuman. Situasi tenaga kerja di enam sektor yang dipaparkan dalam catatan isu ini dapat menjadi informasi dasar bagi pembuat kebijakan dalam menyusun strategi yang efektif untuk menanggulangi dampak pandemi COVID-19 terhadap ketenagakerjaan di Indonesia.

Pandemi COVID-19 yang mulai terdeteksi di Indonesia pada awal Maret 2020 menimbulkan dampak negatif pada kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Pengurangan kegiatan ekonomi dan sosial yang dilakukan untuk menghambat penyebaran COVID-19 di Indonesia dan di berbagai negara mitra dagang Indonesia mengakibatkan kontraksi di berbagai sektor ekonomi sehingga sejumlah tenaga kerja terpaksa dirumahkan untuk sementara waktu dan bahkan sebagian lainnya mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Banyak pekerja di sektor informal pun kehilangan pekerjaannya. Penurunan jumlah pekerja ini diperkirakan akan terus terjadi seiring dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pada triwulan pertama 2020 hanya sebesar 2,97% (Badan Pusat Statistik, 2020). Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan untuk menanggulangi peningkatan pengangguran ini.

Sebagai upaya mendukung penyusunan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih sesuai dengan karakteristik pekerja terdampak, catatan isu ini memberikan informasi mengenai berbagai karakteristik tenaga kerja di sektor yang terdampak pandemi COVID-19.<sup>1</sup> Karakteristik tersebut terdiri atas jenis kelompok pengeluaran (sebagai proksi kesejahteraan), status formal/informal, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan. Adapun lapangan usaha yang dilihat

meliputi penyedia akomodasi, dan makanan dan minuman; perdagangan; transportasi dan pergudangan; konstruksi; industri pengolahan; dan jasa lainnya (Tabel 1).<sup>2</sup> Lapangan usaha tersebut dipilih karena diprediksi terdampak secara negatif oleh pandemi COVID-19 dan proporsi tenaga kerjanya relatif besar.

## 1. Karakteristik Tenaga Kerja Berdasarkan Kelompok Pengeluaran<sup>3</sup>

Sebagian besar tenaga kerja di lapangan usaha yang terdampak krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19, kecuali di sektor konstruksi, berasal dari kelas menengah (Gambar 1). Jika terjadi guncangan, kelompok menengah ini tentunya memiliki kemampuan bertahan yang lebih baik daripada kelompok masyarakat yang lebih miskin (40% terbawah) karena kemungkinan mereka masih mempunyai tabungan atau aset sosial. Namun, lebih dari setengah kelompok menengah ini berada di awal kariernya sehingga tabungannya pun masih terbatas. Jika krisis berkepanjangan, ada kemungkinan tabungan mereka habis. Hal ini tentunya akan meningkatkan kerentanan tenaga kerja dari kelompok menengah. Di samping itu, kelompok menengah ini memiliki bentuk

Tabel 1. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dan Proporsi Tenaga Kerja Masing-Masing Sektor

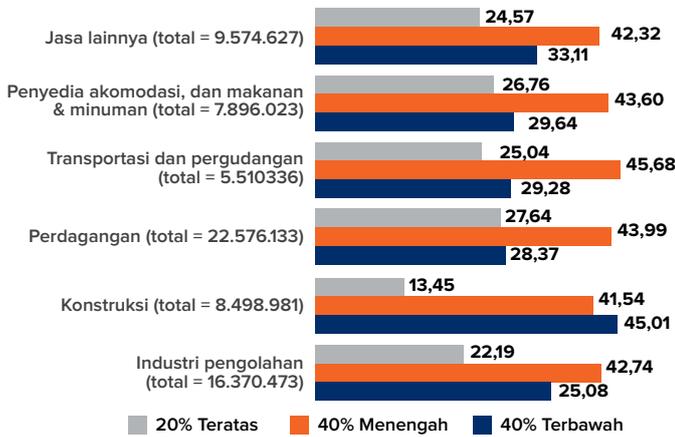
SEKTOR	Pertumbuhan PDB Q4 2019–Q1 2020 (%)	Proporsi Tenaga Kerja (%)
Pertanian, kehutanan, dan perikanan	9,46	27,46
Pertambangan	-0,75	1,11
Industri pengolahan	-1,17	14,88
Pengadaan listrik dan gas	-5,66	0,28
Pengadaan air	-0,89	0,28
Konstruksi	-6,92	6,65
Perdagangan	-1,38	19,00
Transportasi dan pergudangan	-6,38	4,36
Penyedia akomodasi, dan makanan & minuman	-3,54	6,69
Informasi dan komunikasi	2,97	0,74
Jasa keuangan dan asuransi	5,39	1,37
Real estat	0,52	0,33
Jasa perusahaan	-2,28	1,51
Administrasi pemerintahan	-8,54	3,80
Jasa pendidikan	-10,39	4,93
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	1,09	1,53
Jasa lainnya	-1,19	4,09

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2020; dan data Sakernas per Agustus 2019.

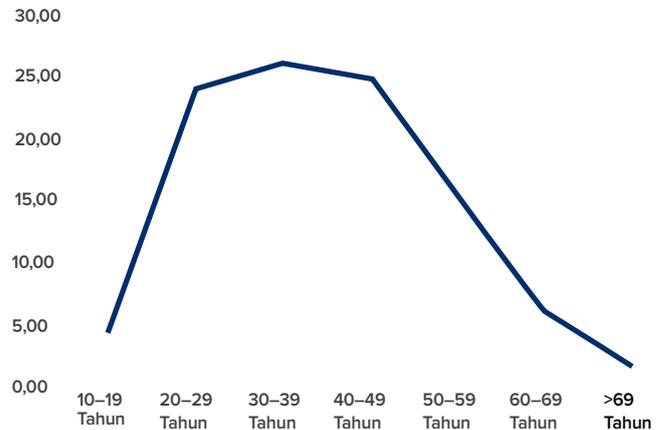
<sup>1</sup> Data yang digunakan diolah dari data Survei Sosial-Ekonomi Nasional per Maret 2019 dan Survei Tenaga Kerja Nasional (Sakernas) per Agustus 2019.

<sup>2</sup> Bappenas (2020) memperkirakan ada enam jenis lapangan usaha yang terkena dampak negatif pandemi ini: penyedia akomodasi, dan makanan dan minuman; perdagangan; transportasi dan pergudangan; konstruksi; industri pengolahan; dan pertambangan. Namun, pertambangan tidak dimasukkan ke dalam catatan isu ini dan diganti dengan sektor jasa lainnya karena proporsi tenaga kerjanya yang relatif lebih kecil.

<sup>3</sup> Data yang digunakan pada bagian ini diolah dari data Susenas per Maret 2019.



Panel A. Proporsi Tenaga Kerja di Enam Sektor



Panel B. Distribusi Umur Kelompok 40% Menengah

Gambar 1. Proporsi tenaga kerja di enam sektor berdasarkan kelompok pengeluaran dan distribusi umur pekerja dari kelompok pengeluaran 40% menengah (%)

kerentanan tersendiri karena hingga saat ini mereka tidak termasuk dalam basis data program perlindungan sosial pemerintah dan kemungkinan besar tidak mendapat bantuan sosial juga. Pemerintah hanya menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai dasar pemberian bantuan. Oleh sebab itu, kebijakan pemerintah untuk melakukan penargetan dengan cara lain sudah menuju ke arah yang tepat untuk dapat menjangkau kelompok menengah ini.

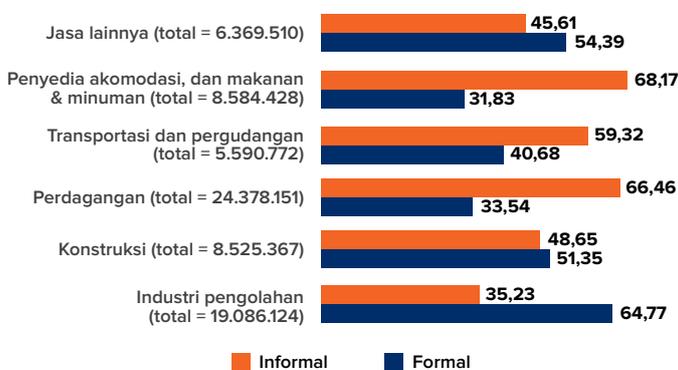
Namun, pekerja informal memiliki akses yang terbatas terhadap program perlindungan sosial dan program pemerintah lainnya. Sebagai contoh, program Pemulihan Ekonomi Nasional yang dirancang untuk menanggulangi dampak krisis COVID-19 baru menysasar sektor formal. Oleh sebab itu, perlu juga kebijakan/program penanggulangan krisis yang menargetkan pekerja di sektor informal.

## 2. Karakteristik Tenaga Kerja Berdasarkan Status Formal/Informal

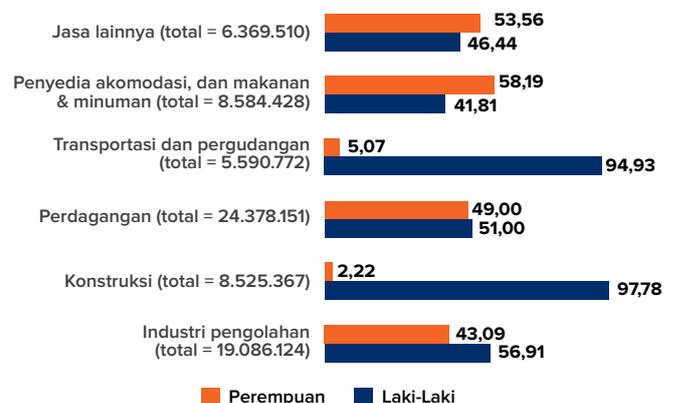
Sektor penyedia akomodasi, dan makanan dan minuman; transportasi dan pergudangan; dan perdagangan didominasi oleh pekerja informal, sementara tiga sektor lainnya didominasi oleh pekerja formal (Gambar 2). Status formal/informal berpengaruh terhadap cara tenaga kerja beradaptasi dengan situasi krisis dan pendekatan intervensi kebijakan penanggulangan pengangguran. Sebagai contoh, pekerja sektor informal lebih mudah mengubah jenis usaha (fleksibel) tergantung pada kondisi perekonomian daripada pekerja formal (Pitoyo, 2007).

## 3. Karakteristik Tenaga Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin

Sektor transportasi dan pergudangan, perdagangan, konstruksi, dan industri pengolahan didominasi laki-laki, sementara sektor jasa lainnya dan penyedia akomodasi, dan makanan dan minuman didominasi perempuan (Gambar 3). Cameron (2018) menyebutkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia tergolong rendah dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Krisis akibat pandemi COVID-19 berpotensi makin menekan tingkat partisipasi kerja perempuan. Hal ini dapat terjadi karena proporsi perempuan yang bekerja di sektor jasa lainnya dan penyedia akomodasi, dan makanan dan minuman lebih besar daripada laki-laki sehingga peluang perempuan di-PHK atau dirumahkan pun cukup besar.



Gambar 2. Proporsi tenaga kerja di enam sektor berdasarkan status formal/informal (%)<sup>4</sup>

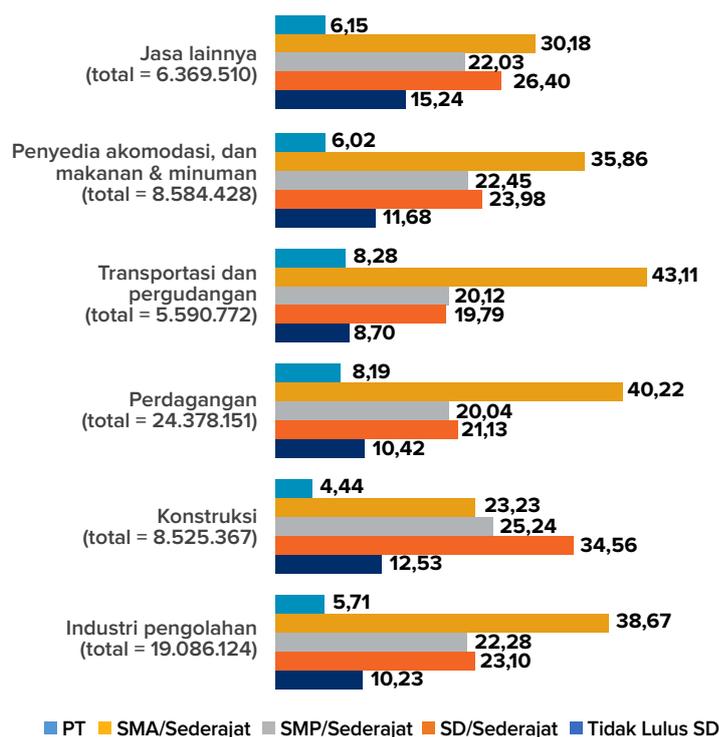


Gambar 3. Proporsi tenaga kerja di enam sektor berdasarkan jenis kelamin (%)

<sup>4</sup> Menurut Badan Pusat Statistik (2016), pekerja formal adalah mereka yang berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar, dan buruh/karyawan/pegawai; selain itu, dikategorikan sebagai pekerja informal.

## 4. Karakteristik Tenaga Kerja Berdasarkan Capaian Pendidikan Tertinggi

Keenam sektor didominasi oleh tenaga kerja dengan latar belakang pendidikan sekolah menengah atas (SMA), kecuali sektor konstruksi yang didominasi lulusan sekolah dasar (SD) (Gambar 4). Makin rendah tingkat pendidikan pekerja, makin terbatas pilihan pekerjaannya pada kelompok pekerjaan dengan keterampilan rendah. Hal ini meningkatkan kerentanan mereka di pasar tenaga kerja. Mathebula *et al.* (2015) menyebutkan bahwa pekerja dengan tingkat pendidikan rendah cenderung memiliki peluang kehilangan pekerjaan yang lebih besar daripada mereka yang berpendidikan lebih tinggi, khususnya di sektor konstruksi. Selain itu, latar belakang pendidikan tenaga kerja yang berpotensi terdampak krisis memberikan informasi penting terkait pendekatan intervensi kebijakan penanggulangan pengangguran yang harus diambil. Sebagai contoh, krisis akibat pandemi COVID-19 berpotensi mengubah struktur lapangan kerja dan dunia bisnis karena pekerjaan yang berhubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi berpotensi memainkan peranan penting ke depan (McKinsey & Company, 2020). Oleh sebab itu, peningkatan kapasitas pencari kerja terkait teknologi, misalnya melalui pelatihan, menjadi sangat penting dan hal ini harus disesuaikan dengan latar belakang dan tingkat pendidikan peserta pelatihan. ■



Gambar 4. Proporsi tenaga kerja di enam sektor berdasarkan pendidikan terakhir (%)

## Daftar Acuan

- Badan Pusat Statistik (2020) 'Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan 1-2020.' *Berita Resmi Statistik* [dalam jaringan] <<https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/05/05/1736/ekonomi-indonesia-triwulan-i-2020-tumbuh-2-97-persen.html>> [11 Juni 2020].
- Badan Pusat Statistik (2016) 'Rapat Interdep Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2016.' Materi dipresentasikan pada rapat interdepartemen (interdep) Sakernas, Jakarta, 13 Desember 2016, tidak dipublikasikan.
- Bappenas (2020) 'Kerangka Ekonomi Makro dan Rencana Kerja Pemerintah 2021.' Materi dipresentasikan pada rapat terbatas (ratas) Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Jakarta, 14 April 2020, tidak dipublikasikan.
- Cameron, Lisa (2018) 'Gender Inequality in the Indonesian Labour Market.' Materi dipresentasikan pada 14<sup>th</sup> IRSA International Conference, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 23-24 Juli 2018, tidak dipublikasikan.
- Mathebula, Lerato, Mulenga Mukuka, Clinton Aigbavboa, dan Wellington Didibhuku Thwala (2015) 'A Theoretical Assessment of Causes of Job Insecurity in the Construction Industry.' Prosiding 12<sup>th</sup> International OTMC Conference - Organisation, Technology, and Management in Construction, 2-6 September 2015, Primošten, Kroasia. Primošten: 1-6.
- McKinsey & Company (2020) 'COVID-19: Implications for Business' [dalam jaringan] <<https://www.mckinsey.com/business-functions/risk/our-insights/covid-19-implications-for-business>> [4 Juni 2020].
- Pitoyo, Agus Joko (2007) 'Dinamika Sektor Informal di Indonesia.' *Jurnal Populasi* 18 (2): 129-146. DOI: <https://doi.org/10.22146/jp.12081>.

SMERU adalah sebuah lembaga penelitian independen yang melakukan penelitian dan pengkajian kebijakan publik secara profesional dan proaktif, serta menyediakan informasi akurat dan tepat waktu dengan analisis yang objektif mengenai berbagai masalah sosial-ekonomi dan kemiskinan yang dianggap mendesak dan penting bagi rakyat Indonesia.

✉ [smeru@smeru.or.id](mailto:smeru@smeru.or.id)  
 🌐 [www.smeru.or.id](http://www.smeru.or.id)  
 📘 The SMERU Research Institute  
 🐦 @SMERUInstitute  
 📺 The SMERU Research Institute  
 📺 The SMERU Research Institute  
 📺 smeru.institute

The SMERU  
Research Institute

Editor:  
Dhanita Putri Sarahtika

Desain dan Tata Letak:  
Novita Maizir

©2020 SMERU

Catatan isu ini adalah salah satu produk rangkaian sembilan studi SMERU yang mengkaji kondisi sosial-ekonomi masyarakat di Indonesia di tengah pandemi COVID-19. #StudiCovid19SMERU

Temuan, pandangan, dan interpretasi dalam catatan isu ini merupakan tanggung jawab penulis dan tidak berhubungan dengan atau mewakili lembaga-lembaga yang mendanai kegiatan dan pelaporan The SMERU Research Institute.